

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut, Secara sederhana multikulturalisme bisa di pahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Atau dapat pula diartikan sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman.¹

Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu. Sedangkan multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang

¹ Azyumardi Azra, Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia, dalam Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Zakiyuddin Baidhawiy (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005) hlm. vii

begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan “*Bhineka Tunggal Ika*” serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Dengan demikian multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan “yang lain”. Kehadiran “yang lain” itu harus dipahami tanpa reduksi, atau distorsi. “Yang lain” itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman desktruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi (Susi Fitri, 2005: th).²

Pengertian multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya. Selain pengertian diatas, multikulturalisme juga berkaitan dengan epistemologi, namun pengertian perkembangan ilmu pengetahuan di dalam

² Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama

kaitannya dengan kehidupan sosial.³ Mengenai pengertian multikulturalisme terbagi menjadi dua tahap perkembangan, yakni tahap pertama aliran multikulturalisme disebut pengertian tradisional multikulturalisme yang mempunyai dua ciri utama, yaitu : 1. Kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), 2. Legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya.

Pada tahap pertama mencakup hal-hal yang esensial di dalam perjuangan kelakuan budaya berbeda (*the other*). Kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya paham multikultural telah menampung berbagai jenis pemikiran baru sebagaimana berikut :⁴

1. Pengaruh studi kultural (Cultural studies) antara lain melihat secara kritis masalah – masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan di dalam masyarakat yang diskriminatif, peranan kelompok – kelompok masyarakat yang termarginalisasi, feminisme, dan masalah – masalah kontemporer seperti toleransi antar kelompok dan agama.
2. Poskolonialisme. Pemikiran poskolonialisme melihat kembali hubungan antara penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak stigma yang biasanya merendahkan kaum terjajah. Diantara pandangan poskolonialisme adalah ingin mengungkap kembali nilai – nilai *Indigenus* di dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing.

³ Chris Barker, penerjemah Nurhadi, *cultural studies* (yogyakarta : kreasi wacana,2000) hlm. 379

⁴ *Ibid.*, hlm 83-84

3. Globalisasi. Globalisasi telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi – potensi budaya asli. Revitalisasi budaya lokal adalah salah satu upaya menentang globalisasi yang mengarah kepada mono kultural.
4. Feminisme dan postfeminisme. Gerakan feminisme yang semula berupaya untuk mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki – laki kini meningkat ke arah kemitraan antara laki – laki dan perempuan. Kaum perempuan juga menuntut sebagai mitra yang sejajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam masyarakat.
5. Teori ekonomi politik neo-Marxisme. Teori ini terutama memfokuskan kepada struktur kekuasaan di dalam suatu masyarakat yang di dominasi oleh kelompok kuat. Teori ini dari Antonio Gramsci mengemukakan mengenai hegemoni yang dapat dijalankan tanpa revolusi oleh intelektual organis yang dapat mengubah suatu masyarakat.
6. Poststrukturalisme. Pandangan ini mengemukakan mengenai perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur – struktur yang telah mapan biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada.

Perkembangan pengertian multikulturalisme diatas menunjukkan bahwa dalam term atau istilah multikulturalisme memiliki arti yang cukup luas. Dalam pengertian yang lain dijelaskan bahwa multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam perbedaan merupakan sebuah konsep yang mampu meredam konflik *vertikal* dan *horizontal* dalam masyarakat heterogen, dimana tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah

terjadi. Masyarakat multikultural diciptakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem budaya (*culture system*) dan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

b. Pendidikan Multikultural

1. Konsep Pendidikan Multikultural

Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran – peran selektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Pendidikan multikultural memiliki dua peran utama, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar pada era globalisasi dan menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya, apabila kedua peran itu dapat dicapai, disintegrasi bangsa dan munculnya konflik dapat dihindarkan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas. Manusia yang cerdas tidak hanya cerdas dan berkemampuan untuk menguasai Ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga bermoral, bersikap demokratis, dan empati terhadap

orang lain. manusia cerdas menghargai diri sendiri dan orang lain dari berbagai latar belakang berbeda.⁵

Secara umum pendidikan multikultural mempunyai arti Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Multikultur adalah berbagai macam status sosial budaya meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku dan lain - lain. Jadi pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian didalam dan diluar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokarasi dan hak asasi manusia.

Azyumardi azra mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. Prudence Crandall mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman suku (*etnis*), ras, agama (*aliran kepercayaan*) dan budaya (*kultur*).

Secara lebih singkat Andersen dan Custer (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya Sedangkan Musa Asy'ari

⁵ Drs. Yahya Suryana, M.Ag. Dr. H.A. Rusdiana, M.M. "Pendidikan Multikultural suatu upaya penguatan jati diri bangsa" hlm. 281

juga menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “*ethnic studies*” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan dirugikan.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural harus mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.⁶ (Menurut H.A.R. Tilaar, 2004).

⁶ H.A.R. Tilaar, 2004

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya 3 (tiga) teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982) ketiga teori sosial tersebut adalah: (1) Melting Pot I: Anglo Conformity, (2) Melting Pot II: Ethnic Synthesis, dan (3) Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (*communal theory*).

Teori pertama, Melting Pot I :Anglo Conformity, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu - individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya, harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya, Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak sangat tidak demokratis.

Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncullah teori kedua, yaitu Melting Pot II : Ethnic Synthesis. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru,

dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya, maka identitas asli dari ketiga etnik tersebut menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru.

Islam Jawa di kraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kejawaan adalah salah satu contohnya. Teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain. Mengingat teori kedua belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori ketiga, yaitu Cultural Pluralism : Mosaic Analogy. Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis.

Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, Betawi, dan Ambon, misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik,

sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah. Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori Cultural Pluralism :Mosaic Analogy. Untuk konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Dalam pelaksanaannya, Banks (2001) menjelaskan lima dimensi yang harus ada yaitu, Pertama, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. Kedua, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komperhensif keragaman yang ada. Ketiga, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. Keempat, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap element yang beragam. Kelima, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultur yaitu agar sekolah menjadi element pengentas sosial (transformasi sosial) dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan.⁷

Dalam Model Pembelajaran Multikultural Ada beberapa pengertian model yang dirumuskan oleh para ahli. Menurut Murdick dan Ross, model adalah perkiraan atau abstraksi dari realitas yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Model merupakan

⁷ Khotimah dan Darusman: Pendidikan Islam berbasis Multikultural

faktor-faktor kunci atau ciri-ciri utama dan bukan bagian-bagian mendetail (Murdick & Ross, 1971:5). Lebih jauh, Simanjuntak (1994) mengklasifikasikan model dalam lima kategori berdasarkan, yaitu: a) fungsi, b) struktur, c) referensi waktu, d) referensi ketidakpastian, dan e) keumuman. Berdasarkan fungsi, model diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 1) model diskriptif, 2) model prediktif, dan model normatif. Berdasarkan struktur, model dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : ikonik, analog, dan simbolik. Model ikonik mempunyai keserupaan yang identik dengan objeknya. Model analog mempunyai struktur yang bersifat analogis dengan objek yang disajikan modelnya. Sementara model simbolik mendeskripsikan objek yang disajikan dengan menggunakan simbol dan rumus. Berdasarkan ketidakpastian, model dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 1) model deterministik, 2) model probabilistik dan 3) game. Adapun berdasarkan keumuman, model dapat digolongkan dalam model umum yang ruang lingkungannya luas dan model khusus yang ruang lingkungannya terbatas (Hutabarat,1994:30). Berdasarkan konsep model tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa model merupakan suatu kerangka sederhana untuk menggambarkan garis-garis besar pelajaran yang harus diberikan.⁸

Sementara itu, H.A.R. Tilaar (2002) menggarisbawahi, bahwa model pendidikan multikultural yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu,

Pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal.

Kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan Weltanschauung yang terus berproses dan merupakan

⁸ Naf'an Tarihoran : *Model pembelajaran bahasa inggris dalam perspektif multikultural*, Saintifika Islamica : Jurnal Kajian Keislaman, vol 4 no.1 Januari-Juni 2017

bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional.

Ketiga, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada.

Keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama.

Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogic pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada.

Keenam, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.⁹

⁹ Khotimah dan Darusman: Pendidikan Islam berbasis Multikultural, op.cit

2. Orientasi Pendidikan Multikultural

Dalam pendidikan khususnya dan setiap aktifitas umumnya pasti terdapat tujuan ataupun orientasinya. Diantaranya ada 3 orientasi pendidikan multikultural:

a. Orientasi muatan dapat dikembangkan melalui beberapa cara, meminjam empat kerangka dari J.A. Banks, reformasi kurikulum dapat didekati melalui beberapa pendekatan: Pertama, pendekatan kontributif adalah pendekatan yang paling sedikit keterlibatannya dalam reformasi pendidikan multikultural. Pendekatan ini dilakukan dengan menseleksi buku-buku teks wajib atau anjuran.

Dalam konteks pendidikan agama, tujuan utama pendekatan kontribusi terhadap muatan kurikulum ini adalah untuk memasukkan materi-materi tentang keragaman kelompok-kelompok keagamaan, kultural dan etnik dalam pendidikan dan subjek pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keragaman kelompok tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana dengan menggabungkan sedikit bacaan multikultural dalam tatap muka kelas, peringatan-peringatan hari suci agama-agama.

Kedua, pendekatan aditif dalam program berorientasi muatan ini mengambil bentuk muatan-muatan, konsep-konsep, tema-tema dan perspektif-perspektif kedalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan pendekatan aditif pendidikan agama memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural sebagai pemer kaya bahan ajar; konsep-konsep tentang harmoni dan kehidupan bersama antar umat beragama memberi nuansa untuk mencairkan kebekuan dalam merespon eksistensi agama-agama lain. Pengayaan perspektif ini dapat membangkitkan

kepekaan siswa dalam mengamati gejala-gejala keagamaan dan berkembang dalam masyarakatnya.¹⁰

Ketiga, pendekatan transformatif yang secara aktual berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa-siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep, isu-isu, tema-tema dan problem-problem lama, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnik. Versi kurikulum yang canggih melakukan transformasi dengan tujuan :mengembangkan muatan kurikulum melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan, menggabungkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang beragam dalam kurikulum, dan mentransformasi, utamanya mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum. Aplikasi dalam pendidikan agama berarti membuat kurikulum baru di mana konsep-konsep tema-tema dan problem-problem yang menjadi muatan kurikulum didekati dengan pendekatan perbandingan.

Keempat, pendekatan aksi sosial yang mengkombinasikan pendekatan transformative dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk melakukan perubahan sosial. Dalam konteks ini pendidikan agama tidak sekedar menginstruksikan siswa untuk memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, namun sekaligus juga melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut.

Geneva Gay menambahkan satu tahapan pengembangan pendidikan multikultural melalui pendekatan dekonstruktif. Pendekatan ini sering dipahami sebagai kritik, dan pembongkaran sekaligus rekonstruksi pengetahuan oleh para

¹⁰ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

teoritisi pendidikan. Menurutnya, tahap dekonstruksi mengarahkan pengajaran dan pembelajaran menuju upaya memelihara siswa untuk menjadi orang skeptis yang sehat, yakni yang secara konstan mempertanyakan klaim-klaim yang sudah ada terhadap kebenaran dan akurasi sosial dan akademik dalam rangka mencari penjelasan baru, dan untuk menentukan agar perspektif-perspektif berbagai kelompok etnik dan kultural terwakili, dan pengetahuan, perspektif serta pengalaman yang secara kultural pluralistik dipergunakan sebagai kriteria untuk menguji kembali premis-premis dan asumsi-asumsi tentang sistem pendidikan yang sudah lama berjalan. Melalui tahap dekonstruksi, aktivitas-aktivitas belajar dilaksanakan dalam kaitannya dengan isu-isu keragaman budaya dan dapat memasukkan upaya-upaya: a) memperjelas bias-bias yang diciptakan orang; b) menentukan cerita siapa yang dibicarakan dan divalidasi dari sudut pandang mana; c) terlibat dalam pengambilan perspektif, d) mawas diri, refleksi diri, dan memperbaharui diri.¹¹

Sugiono menambahkan, program pendidikan multikultural dalam penerapannya saat ini bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun terintegrasi ke dalam mata-mata pelajaran, sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan oleh guru-guru yang kreatif dan inovatif. "Guru-guru dituntut kreatif dan inovatif sehingga mampu mengolah dan menciptakan desain pembelajaran yang sesuai. Termasuk memberikan dan membangkitkan motivasi belajar," katanya.

b) Orientasi siswa. Pendidikan multikultural suatu upaya untuk merefleksi pertumbuhan keragaman masyarakat Indonesia dan khususnya keragaman kelas,

¹¹ *Ibid*, Zakiyuddin Baidhawiy

banyak program bergerak melampaui kurikulum yang ada untuk memenuhi tuntutan akademik tertentu – yakni upaya hati-hati mendefinisikan kelompok-kelompok yang berkembang pada siswa, termasuk kelompok minoritas. Program berorientasi siswa dimaksudkan untuk meningkatkan capaian akademik dari kelompok-kelompok tersebut, meskipun pada saat itu mereka tidak merasakan dan tidak melibatkan diri dalam perubahan ekstensif muatan kurikulum. Program ini dirancang untuk membantu para siswa secara kultural dan keagamaan untuk melakukan transisi ke dalam mainstream pendidikan. Dengan cara ini, program perlu melihat latar belakang kultural dan keagamaan siswa. Dengan sendirinya program ini dapat mengambil beberapa bentuk: pertama, program yang menggunakan penelitian gaya belajar berbasis kultur keagamaan dalam upaya menentukan cara pengajaran mana yang digunakan untuk kelompok siswa tertentu, kedua, program lintas batas; studi bersama antaragama, studi bersama antar etnik; studi bersama antar gender. Hal diatas juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gorski dan Covert bahwa pendidikan multikultural berorientasi pada siswa.¹²

Program pertama memerlukan survey mengenai sejauh mana pengaruh kultur keagamaan terhadap cara belajar efektif para siswa. Survei ini memberikan bekal pada guru untuk melakukan klasifikasi atau kategorisasi secara kultural dan keagamaan. Hasil klasifikasi atau kategorisasi ini menjadi bahan dasar untuk memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok siswa.¹³

¹² Warsono, dkk, *Model Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Peningkatan Wawasan Kebangsaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Ulul Albab, UIN Malang. No. 1. Vol. 7. th. 2006. hlm. 303.

¹³ Zakiyudin Baidhawi, op.cit., hlm 115.

c. Model Pendidikan Pesantren

Secara etimologi pesantren mempunyai definisi yang berasal dari kata pondok, diambil dari bahasa arab yaitu *funduk*, artinya hotel atau tempat menginap. sedangkan dalam bahasa jawa *pondok* berarti bangunan sederhana yang terbuat dari bambu. Kata lainnya adalah pesantren, pesantren berasal dari kata santri dan ditambahkan imbuhan pe-an, sehingga jika kata tersebut disatukan menjadi pe-santri-an dan apabila kalimat tersebut di sederhanakan dalam bahasa keseharian menjadi pesantren. Yang menjadi makna sebenarnya dalam kata pesantren yaitu santri dan menurut beberapa pendapat para ahli kata santri berasal dari bahasa jawa yaitu *cantrik* yang artinya adalah seorang murid dari seorang guru . Namun kata santri tersebut oleh beberapa Ilmuan melalui penelitiannya kata santri berasal dari bahasa India yaitu *shastri* yang artinya kitab suci atau Ilmu pengetahuan.

Model pendidikan yang tidak terikat dengan aturan formal seperti kurikulum, guru, maupun waktu belajar mengajar. Pemberian materi pelajaran diberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan para santri, sehingga selain memiliki kekhususan dalam menentukan kurikulum pembelajaran, pondok pesantren mempunyai kebebasan menentukan tujuan dan sikap. Dalam hal ini Pondok Pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi para santri. Tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup (*long life education*).¹⁴ Siswa dalam pesantren tidak di klasifikasikan dalam jenjang menurut kelompok usia, sehingga masyarakat yang ingin belajar bisa menjadi santri atau selama mungkin.

¹⁴ Ibid

Penentuan segmentasi pondok pesantren, terdapat beberapa unsur yang menjadi faktor utama standar pondok pesantren yaitu kiyai, santri, pondokan, mesjid dan kitab kuning.¹⁵ Standar tersebut ada, serta menjadi standar untuk seseorang dalam menilai pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal yang bergerak di bidang agama dengan metode pendidikan tradisional, ataupun sering di sebut juga *salafiah*. Namun seiring berkembangnya zaman akibat arus global, pesantren pun mengalami banyak perubahan sehingga banyak sekali jenis atau model pesantren saat ini.

Perkembangan pesantren selalu menjadi nilai dasar yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga banyak sekali pesantren bermunculan. Pesantren memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan agama bagi masyarakat, pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pendidikan
2. Perkembangan sosial dan budaya
3. Perkembangan ekonomi
4. Dakwah.¹⁶

Tuntutan perkembangan zaman pada modern ini banyak merubah konsep pesantren. Pesantren yang dulu sebagai lembaga pendidikan islam tradisional dan bersifat *non formal*, saat ini sebagian pesantren *bermetamorfosis* menjadi lembaga pendidikan modern. Perkembangan terakhir dari sistem pendidikan pondok pesantren telah mengalami perubahan besar, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan dapat dilihat klarifikasi tingkatan pondok

¹⁵ Zamakhsyari dhofier.op.cit. hlm 73,93

¹⁶ Akhmad Satori, Catatan perkuliahan pesantren dan politik

pesantren. Ada lima macam pola pesantren, dari yang paling sederhana sampai dengan yang sudah maju yaitu :

- a. Pola kesatu, pesantren yang terdiri dari mesjid dan rumah kiyai.
- b. Pola kedua, pesantren yang terdiri dari mesjid, rumah kiyai, dan pondok.
- c. Pola ketiga, pesantren yang terdiri dari mesjid, rumah kiyai, pondok, dan madrasah
- d. Pola keempat, pesantren yang terdiri dari mesjid, rumah kiyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan.
- e. Pola kelima, pesantren yang terdiri dari mesjid, rumah kiyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolah umum.

Pesantren dengan pola keempat dan kelima inilah yang sering dikatakan sebagai pesantren modern, disamping bangunan – bangunan yang sudah disebut di atas masih ada lagi bangunan lain seperti perpustakaan, dapur umum, toko, dan fasilitas lainnya. namun pada umumnya Ada beberapa ciri yang dimiliki pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan masyarakat. Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima unsur yang merupakan elemen pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kyai.¹⁷

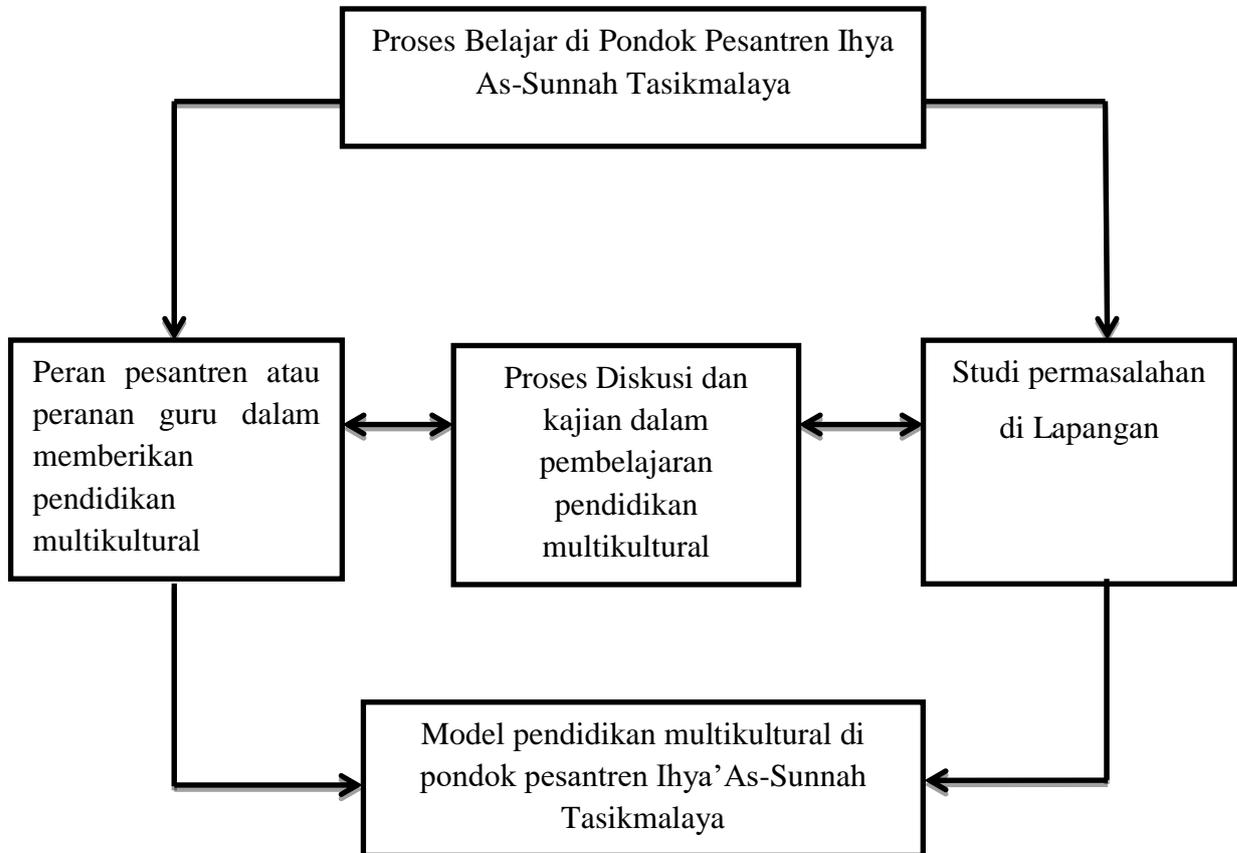
Pesantren pada umumnya dipahami sebagai lembaga pendidikan agama yang bersifat tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat melalui suatu proses sosial. Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan juga berperan sebagai lembaga

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, op. cit., h. 44-60.

sosial yang berpengaruh. Keberadaannya memberikan pengaruh dan warna keberagaman dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, tidak hanya di wilayah administrasi pedesaan, tetapi tidak jarang melintasi daerah di mana pesantren itu berada. Pesantren dijadikan sebagai agen perubahan (*agent of change*) sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah arus modernisasi, agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan, pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya dalam kaitannya dengan perkembangan zaman untuk membekali mereka dengan keahlian melalui berbagai macam pendidikan dan keterampilan. Tujuan pendidikan pesantren adalah terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan Islam yang bersifat menyeluruh dan dilengkapi dengan kemampuan untuk mengadakan respons terhadap tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu baik di Indonesia maupun dunia abad sekarang.

B. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Bagan diatas menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini. Pada dasarnya gerakan intelektual akan mengacu pada ilmu pengetahuan yang di pahami oleh seorang intelektual tersebut, Dan disitulah peranan lembaga pendidikan sangat efisien atau sangat di butuhkan dalam memberikan pendidikan multikultural. Maka proses belajar merupakan salah satu hal yang paling penting bagi seorang intelektual untuk memahami pendidikan multikultural. Pemahaman yang di hasilkan dari proses belajar

tersebut hendaknya menjadi sebuah teori sebagai bahan analisis sebuah permasalahan di lapangan.

Akan tetapi dalam sebuah kajian atau diskusi ilmiah yang membahas permasalahan multikultural atau budaya, sosial politik dan keagamaan biasanya tidak hanya dapat terselesaikan dalam bentuk teori saja atau wacana berfikir. Sehingga peneliti mencantumkan peranan pesantren dalam pendidikan multikultural sebagai salah satu jembatan dari model pendidikan multikultural. Karena pada dasarnya berdasarkan pemahaman peneliti bahwa pendidikan multikultural tidak hanya diberikan oleh sebuah kelompok atau golongan seperti, pemerintahan, dan lain- lain. Tetapi alangkah lebih baiknya jika lembaga pendidikan pun khususnya pesantren ikut berperan aktif dalam memberikan pendidikan multikultural kepada masyarakat sebagai media pembelajaran sebagai upaya mengajak, untuk berperilaku saling menghargai dan menghormati suatu perbedaan serta keanekaragaman yang ada di negara ini dan mencerdaskan masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil salah satu perbandingan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan model pendidikan multikultural yaitu Jurnal Sosiohumaniora (Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial dan Humaniora) oleh Akhmad Satori dan Wiwi Widiastuti, Universitas Siliwangi 2018. Dengan judul penelitian “*Model pendidikan multikultural pada pesantren tradisional di kota tasikmalaya dalam mencegah ancaman radikalisme*” perbedaannya dalam jurnal ini adalah Objek / tempat penelitian berbeda.

Kemudian penulis juga mengambil salah satu perbandingan dari jurnal pusaka, yang berhubungan dengan pendidikan multikultural oleh Luk – Luk Nur Mufidah, dari IAIN Tulungagung tahun 2016. Dengan judul penelitian “ *pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan*” Perbedaan nya dalam jurnal ini lebih menekankan pada bagaimana implementasi multikultural terhadap kebijakan pendidikan.

Serta penulis juga mengambil salah satu perbandingan dari skripsi yang berhubungan dengan Pesantren Ihya’As-Sunnah kota Tasikmalaya oleh Deden, dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun 2016. Dengan Judul penelitian “ *“Budaya politik pondok pesantren Ihya’As-Sunnah kota tasikmalaya*” namun pada penulisannya lebih terfokus pada masalah budaya politik yang ada di pesantren Ihya As-Sunnah.

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luk – Luk Nur Mufidah, dari IAIN Tulungagung tahun 2016.	<i>“ pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan “</i>	Sama sama membahas mengenai pendidikan multikultural	Lebih terfokus pada implikasi terhadap kebijakan pendidikan.
2.	Deden Universitas siliwangi 2016	<i>“Budaya politik pondok pesantren Ihya’As-Sunnah kota tasikmalaya”</i>	Objek / tempat penelitian sama	Lebih fokus kepada pembahasan tentang budaya politik
3.	Akhmad Satori dan Wiwi Widiastuti Universitas Siliwangi Jurnal, vol 20, No 1 (2018)	<i>”Model pendidikan multikultural pada pesantren tradisional di kota tasikmalaya dalam mencegah ancaman radikalisme”</i>	Sama sama membahas mengenai model pendidikan multikultural di sebuah pesantren	Objek / tempat penelitian berbeda

Tabel 2.2

Matrik Penelitian penulis

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainun Bahri Tarigan (2019) Topik : Model pendidikan multikultural di pondok pesantren Ihya As'Sunnah Tasikmalaya	Membahas bagaimana model pendidikan multikultural di pondok pesantren Ihya As'Sunnah Tasikmalaya. Fokus kajian menekankan pada model pendidikan multikultural	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang pendidikan multikultural, serta objek penelitian yang di lakukan di sebuah pesantren	Perbedaan penelitian ini adalah studi kasus serta topik yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu model pendidikan multikultural di pondok pesantren Ihya As'Sunnah kota Tasikmalaya